

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kesejahteraan**

###### **a. Pengertian kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu atau masyarakat, baik yang bersifat material maupun non material. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan individu. Pengukuran kesejahteraan dapat dilakukan secara objektif maupun subjektif. Kesejahteraan objektif adalah kesejahteraan individu atau kelompok yang diukur berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang telah disepakati yang berkaitan dengan ukuran ekonomi, sosial, dan ukuran-ukuran lainnya.

Kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan individu yang diukur secara personal berupa kepuasan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dapat digambarkan dan dianalisis dengan menanyakan kepada orang yang bersangkutan tentang bagaimana kepuasan hidupnya. Individu merupakan penilai yang baik atas kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Sehingga dapat

disimpulkan juga bahwa kesejahteraan subjektif memiliki arti yang sama dengan kebahagiaan<sup>16</sup>.

Pengertian kesejahteraan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 (1) tentang kesejahteraan, kesejahteraan adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila<sup>17</sup>.

Menurut Suroso Imam Zadjuli, kesejahteraan dalam syariah Islam adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif maupun secara menyeluruh (*the holistic goals the maqasid*) sehingga manusia mencapai kebahagiaan secara holistic pula lahir dan batin, dunia dan akhirat (*human falah*). Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki,

---

<sup>16</sup> Ni Nyoman Yuliarmi, Maryam Dunggio, and I. Nyoman Mahaendra Yasa, 'Improving Public Welfare through Strengthening Social Capital and Cooperative Empowerment', *Cogent Business and Management*, 7.1 (2020).

<sup>17</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah dapat beribadah dengan nyaman dan tenang, kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah dan lain sebagainya<sup>18</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian kesejahteraan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana individu atau kelompok merasa aman dan nyaman serta selamat dengan terpenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan yang bersifat material juga kebutuhan spiritual. Sehingga dapat tercapainya suatu kemaslahatan atau kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat.

b. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan dalam Islam memiliki keistimewaan dalam konsep yang ada didalamnya karena mengandung unsur nilai material maupun nonmaterial. Kemudian, kesejahteraan ini dilihat dari perspektif *maqashid syariah* karena *maqashid* adalah tujuan syariah secara keseluruhan dan agama merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Masalah mutlak yang diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan *ukhrawi* dan duniawi tidak akan mungkin tercapai melainkan dengan memelihara lima hal yang

---

<sup>18</sup> Mahmud Yusuf, *Kesejahteraan Perspektif Islam* (Mataram: kakapress, 2017), hlm 17.

bersifat *dharuriyah* pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>19</sup>.

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Pemeliharaan agama atau keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan yaitu perilaku, gaya hidup, selera, preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumberdaya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan cara pemuasannya. Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting, tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua manusia. Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam

---

<sup>19</sup> Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm 53.

hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang<sup>20</sup>.

Kesejahteraan menjadi salah satu tujuan agama Islam itu sendiri, dalam konsep kesejahteraan perspektif ekonomi Islam terdapat perbedaan dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya sekedar terpenuhinya segala kebutuhan material saja seperti berupa rizki yang melimpah dengan pendapatan yang tinggi, namun diukur dengan terpenuhinya aspek spiritualitas seperti keberkahan dalam rizki tersebut, ketaatan dalam beribadah baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah.

## **2. Pemberdayaan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah

---

<sup>20</sup> Martini Dwi Pusparini, ‘Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)’, *Islamic Economics Journal*, 1.1 (2015), 45.

dalam bahasa Inggris “*empowerment*”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu atau miskin memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan<sup>21</sup>.

Menurut Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,

---

<sup>21</sup> M.Si Ir. Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hlm 9.

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya<sup>22</sup>.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Sedangkan menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni konsep *power* “daya” dan konsep *disadvantaged* “ketimpangan”<sup>23</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperkuat kelompok lemah sehingga mereka dapat meningkatkan seluruh potensi yang dimiliki yang akhirnya dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

---

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 60.

<sup>23</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2013).

## b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/ kemandirian, dan keberlanjutan<sup>24</sup>.

### 1) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut.

### 2) Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Sri Najiyati, A Asmana, and I Nyoman N Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut* (Bogor: Perpustakaan Nasional, 2005), hlm 54-59.

### 3) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*) melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*).

### 4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, karena banyak kegiatan pemberdayaan berskala proyek yang tegas batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek Semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis.

#### c. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sri dan Suksesi, pemberdayaan selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan, diantaranya<sup>25</sup>:

---

<sup>25</sup> Sri Handini, Suksesi, and Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hlm 46-49.

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

- 5) Perbaiki usaha (*better business*), perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan, dan perbaiki kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*), dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*), perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

d. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, karena pemberdayaan merupakan suatu proses dan tidak

dapat dilakukan secara instan. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan diri sehingga mampu mengelola program pemberdayaan dengan efektif. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan menurut Subejo dan Supriyanto yaitu dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat<sup>26</sup>.

- 1) Pertama, seleksi lokasi/wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.
- 2) Kedua, sosialisasi pemberdayaan yang dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. sosialisasi ini dapat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program.
- 3) Ketiga, proses pemberdayaan yang terdiri dari beberapa proses diantaranya:

---

<sup>26</sup> Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (Kediri: FAM Publishing, 2019). hlm 17-19.

- a) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensi serta peluang.
  - b) Menyusun rencana program.
  - c) Proses penerapan rencana program yang telah disusun.
  - d) Monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pemberdayaan.
  - e) Pemandirian masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya.
- e. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Ketika melakukan pemberdayaan di lokasi tertentu, pemerintah setempat atau kelembagaan harus memiliki indikator keberhasilan untuk memahami apakah sukses atau tidaknya pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat mengemukakan indikator-indikator sebagai berikut<sup>27</sup>:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

---

<sup>27</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah Dan Pembangunan* (Sumedang: UNPAD Press, 2016), hlm 61.

- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 4) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.
- 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

### **3. Ekonomi Pesantren**

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menunjukkan makna tempat tinggal para santri<sup>28</sup>. Pengertian pesantren secara terminologi telah diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Dhofier memberikan pengertian: Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan kompleks

---

<sup>28</sup> Rachmawan Budiarto and others, *Model Bisnis Pengembangan Ekonomi Pesantren* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), hlm 12.

pesantren di mana kiai bertempat tinggal juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

- b. Dauly mendefinisikan: Saat sekarang pengertian yang populer dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian atau disebut *tafaqquh fiddin* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.
- c. Djamaluddin memberikan pandangan: Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta independen dalam segala hal<sup>29</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian pesantren diatas, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menjadi tempat bagi para santri untuk memperdalam ilmu agama di bawah kepemimpinan seorang kiai untuk mencetak kader-kader ulama

---

<sup>29</sup> Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017), hlm 27-28.

di masa yang akan datang. Dan pesantren ini memiliki beberapa unsur seperti asrama, santri, kyai dan pengajian kitab-kitab.

Secara eksplisit tujuan dan fungsi pondok pesantren tidak dinyatakan dengan tegas dan jelas dalam sebuah aturan dasar atau aturan rumah tangga, namun secara implisit tergambar bahwa tujuan dan fungsi pendidikan pesantren tidak hanya bersifat keagamaan semata, melainkan juga memiliki relevansinya dengan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, hadirnya pesantren diharapkan dapat membawa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat (*agent of social change*)<sup>30</sup>.

Menurut Suhartini, pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban pesantren, yaitu<sup>31</sup>:

- a. Pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Centre of Excellence*).
- b. Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*).
- c. Ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*).

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 40-42.

<sup>31</sup> Halim and others, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm 233.

Pesantren dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, tentang pesantren. Pasal 43). Sedangkan dalam Pasal 44 disebutkan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Adapun pasal 45 dalam Undang-undang tersebut menguraikan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- 1) Pelatihan dan praktek kerja lapangan.
- 2) Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat.
- 3) Pendirian koperasi.
- 4) Pendirian lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat.
- 6) Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan.
- 7) Pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu.
- 8) Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 9) Pengembangan program lainnya<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

#### 4. Pengukuran Kemiskinan Model CIBEST

Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti membangun dan menerbitkan model CIBEST untuk pertama kalinya pada tahun 2015 dengan penelitiannya yang berjudul “*Construction of Cibest Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective*”. Model CIBEST adalah salah satu model pengukuran tingkat kemiskinan berdasarkan perspektif Islam yaitu konsep kemiskinan yang diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Penelitian ini juga telah berhasil mengembangkan model CIBEST, yang terdiri dari indeks kesejahteraan, kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual dan absolut kemiskinan. Indeks ini didasarkan pada prinsip CIBEST yang menegaskan kembali ajaran Islam tentang kemiskinan dan kesejahteraan<sup>33</sup>. Dengan demikian, kesejahteraan pada Model CIBEST ini didasarkan pada pemenuhan dua kebutuhan, yaitu kebutuhan material dan juga kebutuhan spiritual.

##### a. Kebutuhan Material

Standar kebutuhan material ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat mendasar.

---

<sup>33</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, ‘Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective’, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7.1 (2015), 87–104.

Suatu rumah tangga/keluarga dikatakan mampu secara materiil apabila pendapatan mereka berada diatas nilai MV (*Material Value*). Demikian sebaliknya, rumah tangga/keluarga dikatakan miskin secara materiil apabila pendapatan mereka, berada di bawah nilai MV. Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai standar Garis Kemiskinan (GK) yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BPS) atau didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak. Secara umum, cara menghitung nilai MV ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survei tidak dapat dilaksanakan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga di suatu wilayah pengamatan.

3) Menggunakan standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan<sup>34</sup>.

b. Kebutuhan Spiritual

Pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung dari standar pemenuhan lima variabel, yaitu skor pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, skor lingkungan keluarga/rumah tangga, dan skor kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor pada masing-masing variabel ini digunakan skala Likert antara 1 hingga 5. Garis kemiskinan spiritual atau *Spiritual Value* (SV) nilainya adalah sama dengan 3 (tiga). Hal ini didasarkan argumentasi bahwa kemiskinan spiritual terjadi ketika seseorang/keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara rutin, atau menganggap ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga atau masyarakat yang tidak perlu diatur dengan baik. Contoh, shalat zuhur itu wajib. Ketika seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat zuhur dan pada waktu lain melaksanakannya sesekali, maka secara spiritual orang tersebut sesungguhnya miskin karena berani meninggalkan ibadah wajib dan melaksanakannya secara tidak rutin. Inilah dasar mengapa nilai SV yang diambil adalah 3<sup>35</sup>.

Dalam konteks kuadran CIBEST ini, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal,

---

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 91-92.

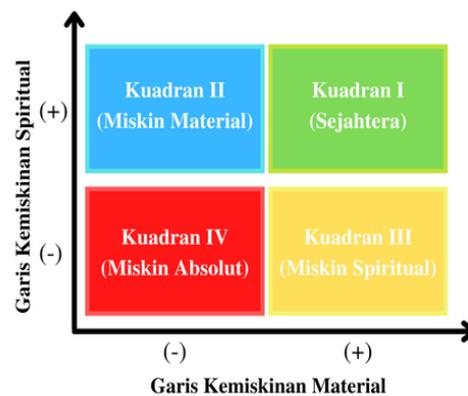
<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 94.

yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah.

- 1) Shalat, puasa, dan zakat adalah termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan seseorang dapat ditentukan oleh komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Penolakan atau keengganan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut akan mengurangi kadar kualitas keimanan seseorang dan akan “memiskinkan” kondisi spiritual atau ruhiyah. Oleh karena itu, batasan garis kemiskinan spiritual adalah dengan melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa ramadhan, dan membayar zakat bila mampu atau minimal berinfak sekali dalam satu tahun. Jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan maka seseorang atau suatu rumah tangga dianggap miskin secara spiritual atau ruhiyah.
- 2) Variabel lingkungan keluarga atau rumah tangga termasuk ke dalam kebutuhan spiritual minimal dikarenakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi komitmen atau kesempatan dalam melaksanakan ibadah. Jika dalam suatu keluarga tidak ada upaya untuk mengingatkan anggota keluarga agar istiqomah dalam melaksanakan shalat wajib, maka komitmen untuk beribadah pun bisa jadi luntur. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah, jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas kepada perusahaan atau suatu lembaga yang

melarang karyawan atau pegawainya untuk melaksanakan ibadah wajib, atau bahkan pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi bahkan melarang pelaksanaan suatu ibadah, maka berarti kesempatan untuk beribadah menjadi sulit, sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas keimanan para pegawai atau karyawan. Kondisi ini dapat menciptakan kemiskinan spiritual masyarakat.<sup>36</sup>

Setelah melakukan perhitungan nilai pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual rumah tangga, maka Model CIBEST akan membagi kondisi keluarga dengan mengklasifikasikan pada 4 kuadran CIBEST, adapun kuadran CIBEST disajikan pada gambar 2. 1 berikut.



**Gambar 2. 1 Kuadran CIBEST**

a. Kuadran I (Sejahtera)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (+) pada kedua pemenuhan kebutuhan, yaitu material dan spiritual. Sehingga penerima manfaat dapat dikatakan sejahtera apabila penerima manfaat dianggap mampu secara material maupun spiritual.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 79.

b. Kuadran II (Kemiskinan Material)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, dan tanda (-) pada kebutuhan material. Sehingga penerima manfaat dapat dikatakan miskin material karena dianggap mampu secara spiritual namun tidak mampu secara material.

c. Kuadran III (Kemiskinan Spiritual)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (-) pada kebutuhan spiritual, dan tanda (+) pada kebutuhan material. Sehingga para penerima manfaat dapat dikatakan miskin spiritual karena dianggap mampu secara material namun tidak mampu secara spiritual.

d. Kuadran IV (Kemiskinan Absolut)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (-) pada kedua kebutuhan, yaitu material dan spiritual. Kondisi ini merupakan posisi terburuk pada para penerima manfaat, karena para penerima manfaat tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya secara sekaligus<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 76-77.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arif Rahman Nurul Amin, Maya Panorama (2021) <sup>38</sup>	Pesantren sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Potensi kontribusi pesantren terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan tidak bisa dinafikan, pesantren dengan segala dinamika sejarah dan kulturenya memiliki peran penting dalam kebangsaan, sehingga dengan kuantitas serta kualitasnya pesantren dapat memberikan andil dan peran penting dalam pemberdayaan memajukan ekonomi kerakyataan.
<b>Persamaan:</b>		Fokus penelitian yang digunakan yaitu meneliti terkait pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.	
<b>Perbedaan:</b>		<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif fenomenologi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan model CIBEST.</p> <p>b. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi pemberdayaan ekonomi pesantren.</p>	

<sup>38</sup> Arif Rahman Nurul Amin and Maya Panorama, 'Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2.7 (2021), 895–914.

	<p>Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual.</p> <p>c. Objek penelitian berfokus pada salah satu pondok pesantren secara umumnya yaitu Pesantren Aulia Cendikia Talang Jambe, Kota Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek penelitian pada salah satu program pemberdayaan ekonomi pesantren yaitu unit usaha DN Laundry Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya.</p>		
2.	Yunita Nur Laili F.M., Irham Zaki (2020) <sup>39</sup>	<p>Pemberdayaan Masyarakat di Pondok Pesantren Dalwa berdasarkan Model Evaluasi Sumatif CIPP</p>	<p>Anteseden program yaitu dilakukan di pesantren DALWA karena faktor kemandirian, kepercayaan, dan dakwah. Selanjutnya, pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk masyarakat umum terutama laki-laki yang berkompeten, ikhlas, dan amanah. Pemberdayaan dilakukan melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan</p>

<sup>39</sup> Yunita Nur Laili and Irham Zaki, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Pondok Pesantren Dalwa Berdasarkan Model Evaluasi Sumatif Cipp', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.7 (2020), 1214.

			pendayaan. Hasil adanya pemberdayaan dapat tercermin dalam bidang bina manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan. Dampak pemberdayaan adalah positif untuk pihak pemberdayaan dan masyarakat.
	<b>Persamaan:</b>	Fokus penelitian yang digunakan yaitu meneliti terkait pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.	
	<b>Perbedaan:</b>	<p>a. Model penelitian yang digunakan yaitu Model Evaluasi Sumatif CIPP. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan model penelitian dengan Model CIBEST.</p> <p>b. Objek penelitian berfokus pada salah satu pondok pesantren secara umumnya yaitu Pondok pesantren Darullughah Wadda'wah, Pasuruan Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek penelitian pada salah satu program pemberdayaan ekonomi pesantren yaitu unit usaha DN Laundry Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya.</p>	
3.	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto,	Peran Pondok Pesantren Al Mumin	Pondok pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung dengan

	<p>Imam Muhtadin (2023)</p>	<p>Muammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Selompang</p>	<p>sumber dayanya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Selompang Temanggung. Pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat meliputi penciptaan peluang usaha, lapangan pekerjaan, badan usaha, lembaga keuangan syariah, dan lembaga sosial Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung. Pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat berbasis pesantren strategis untuk dikembangkan dengan kearifan lokalnya secara efektif.</p>
	<p><b>Persamaan:</b></p>	<p>Fokus penelitian yang digunakan yaitu meneliti terkait pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.</p>	
	<p><b>Perbedaan:</b></p>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan model CIBEST.</p>	

	<p>b. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung dan para aktor dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Selopampang Temanggung. Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual.</p> <p>c. Objek penelitian berfokus pada salah satu pondok pesantren secara umumnya yaitu Pondok Pesantren Al Mu'min Muhammadiyah Temanggung. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek penelitian pada salah satu program pemberdayaan ekonomi pesantren yaitu unit usaha DN Laundry Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya.</p>		
4.	Achmad Luthfi Chamidi (2023) <sup>40</sup>	Peran Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul	Bentuk pemberdayaan ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) dengan menerapkan sistem ekonomi protektif ini pondok mampu untuk

<sup>40</sup> Achmad Luthfi Chamidi, 'Peran Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi ( Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul ' Ulum Tambakberas Jombang )', 9.02 (2023), 3079–91.

	‘Ulum Tambakberas Jombang)	melindungi dan mencukupi kebutuhan santri di dalam pondok dengan unit usaha yang dikelola oleh pondok sendiri sehingga santri tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif yang ada di luar pesantren serta melindungi santri dari hidup boros. (2) Dengan melakukan kegiatan usaha, antara lain; Ibbien Mart, Ibbien Net, Ibbien Caffé, Ibbien Kantin, Ibbien Store, Baitul Maal al-Muhibbin, Ibbien Foods, Ibbien Grosir, dan Bank Sampah. Sehingga dampak dengan adanya pemberdayaan yang dikelola oleh pondok mampu mendorong kemandirian ekonomi di dalam memenuhi kebutuhan dasar oleh santri maupun masyarakat sekitar.
<b>Persamaan:</b>	Fokus penelitian yang digunakan yaitu meneliti terkait pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.	

<b>Perbedaan:</b>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan model CIBEST.</p> <p>b. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual.</p> <p>c. Objek penelitian berfokus pada pemberdayaan salah satu pondok pesantren secara umumnya yaitu Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Jombang Jawa Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek penelitian pada salah satu program pemberdayaan ekonomi pesantren yaitu unit usaha DN Laundry Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya.</p>		
5.	Mohammad Rifky Khariri (2021) <sup>41</sup>	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren	Kopontren Al-Hikam telah melakukan perannya sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan yang

<sup>41</sup> Mohammad Rifky Khariri, ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang)’, *Ekonomi Islam Universitas Brawijaya*, 10.2 (2021).

		<p>(Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang)</p>	<p>dilakukan oleh kopontren Al-Hikam menghasilkan pengaruh di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Beberapa peran yang telah dilakukan oleh kopontren Al-Hikam adalah pembukaan lapangan pekerjaan baru yang mana sampai saat ini kopontren Al-Hikam telah memiliki karyawan berjumlah 41 orang dengan hal ini maka kopontren telah membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan hingga memiliki pekerjaan dan berperan dalam membantu mengembangkan usaha mitra kopontren dan meningkatkan pendapatan mitra kopontren Al-Hikam cara yang dilakukan oleh kopontren yaitu dengan melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya yang mana mitra koperasi ini menitipkan produk yang</p>
--	--	--	---

		akan dijual di kopontren Al-Hikam.
<b>Persamaan:</b>	Memiliki persamaan pada fokus penelitian yang digunakan yaitu meneliti terkait pemberdayaan ekonomi pesantren untuk kesejahteraan masyarakat.	
<b>Perbedaan:</b>	<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan model CIBEST.</p> <p>b. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran kopontren dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh kopontren Al-Hikam Malang. Sedangkan tujuan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui program unit usaha DN Laundry Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya untuk kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual.</p>	

### C. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>42</sup>.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, pesantren telah terbukti menjadi pusat pendidikan serta menjadi barometer pertahanan moralitas umat sehingga mampu melakukan perubahan ke arah transformasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan pesantren dapat mengadaptasi perubahan dan tantangan sosial masyarakat baik konteks lokal, nasional maupun global<sup>43</sup>. Melihat potensi yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri serta peranannya dengan terlibat dalam perubahan sosial (*sosial chage*), maka sebenarnya pesantren dapat dijadikan sebagai solusi dengan menjadi perantara bagi masyarakat terutama dalam menghadapi permasalahan kemiskinan sehingga melalui pemberdayaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh pesantren dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi baik kemiskinan material ataupun kemiskinan spiritual.

Secara konseptual pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 60.

<sup>43</sup> Agusti, Dassucik, and Hafas Rasyidi.

masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Dengan harapan, melalui pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok lemah tersebut<sup>44</sup>.

Kesejahteraan dalam Islam akan tercapai jika kebutuhan hidup terpenuhi, kesejahteraan sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi indikatornya. Salah satu indikator kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Meskipun demikian, al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, sehingga harta bukanlah tujuan akhir manusia di muka bumi ini. Islam memandang bahwa kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual<sup>45</sup>.

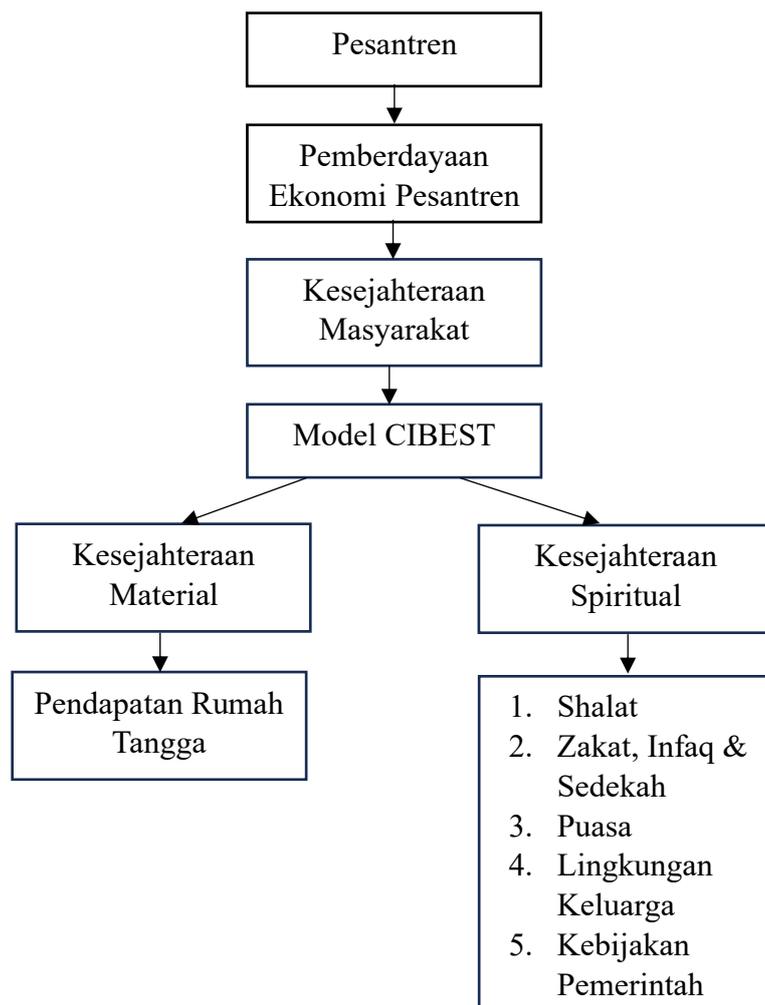
Pengukuran kesejahteraan atau kemiskinan secara material dan spiritual dapat diukur dengan menggunakan Model CIBEST (*Central of Islamic Business and Economic Studies*). Indikator kesejahteraan atau kemiskinan material berupa pendapatan suatu rumah tangga, sedangkan kesejahteraan atau kemiskinan spiritual diukur dalam lima indikator yaitu shalat, puasa, zakat, infaq dan sedekah, lingkungan keluarga serta kebijakan pemerintah.

---

<sup>44</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106–34.

<sup>45</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, 'Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam', *Jurnal Econetica*, 1.2 (2019), 11–24.

Dari uraian diatas, secara konseptual pemberdayaan ekonomi pesantren dapat memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik kesejahteraan secara material juga kesejahteraan spiritual. Maka, dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran peneliti seperti pada gambar 2. 2 dibawah ini:



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub bab masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori dan masih harus diuji kebenarannya. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul atau penelitian ilmiah<sup>46</sup>.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Pendapatan dan spiritual rumah tangga masyarakat setelah mengikuti program unit usaha DN laundry tidak berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan dan spiritual rumah tangga sebelum mengikuti program unit usaha DN Laundry.

$H_a$  : Pendapatan dan spiritual rumah tangga masyarakat setelah mengikuti program unit usaha DN laundry berbeda nyata pada taraf  $\alpha = 5$  persen terhadap pendapatan dan spiritual rumah tangga sebelum mengikuti program unit usaha DN Laundry.

---

<sup>46</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm 93.